

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, Sekretariat Daerah Kota Batam telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa instansi Pemerintah wajib melaporkan kinerjanya selama 1 (satu) tahun anggaran (LKjIP) yang meliputi capaian kinerja sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Melalui Laporan Kinerja ini dapat dikomunikasikan dan diinformasikan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam selama Tahun 2024. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan capaian kinerja dengan Rencana Kinerja 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Kegiatan-kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024. Kegiatan-kegiatan tersebut telah dapat direalisasikan sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan dan tidak ditemui permasalahan yang berarti dalam pelaksanaannya.

Kami berharap laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif dan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Batam dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Kinerja Sekretariat Kota Batam Tahun 2024.

Batam, Januari 2025
Sekretaris Daerah Kota Batam



H. JEFRIDIN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19681225 199802 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	1
1.2.1. Tata Kerja	1
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4. Landasan Hukum	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis	14
2.1.1. Visi Pemerintah Kota Batam.....	14
2.1.2. Misi Pemerintah Kota Batam Kota Batam.....	15
2.2. Tujuan dan Sasaran	19
2.3 Perjanjian Kinerja.....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	43
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	43
3.2. Perbandingan Capaian Kinerja	53
3.3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	65
3.4. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	81
BAB IV PENUTUP.....	85
4.1. Kesimpulan	85
4.2. Saran.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Visi dan Misi.....	17
Tabel 2 Tujuan Dan Sasaran.....	20
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	37
Tabel 4 Program dan Kegiatan	38
Tabel 5 Capaian Kinerja Organisasi	44
Tabel 6 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja	54
Tabel 7 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	64
Tabel 8 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, Dan Solusi.....	66
Tabel 9 Tabel Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program Serta Kegiatan	70
Tabel 10 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

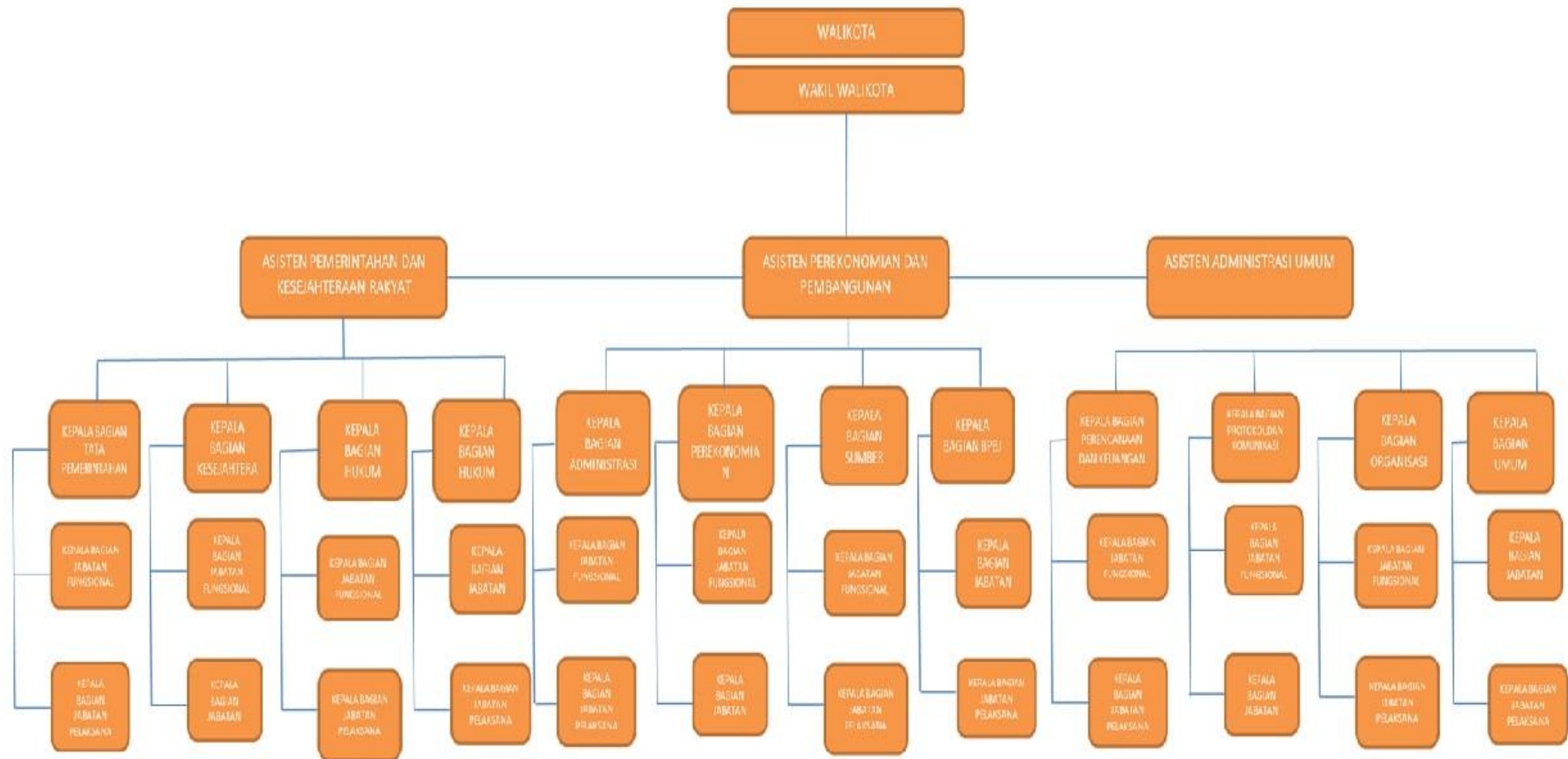
Penyelenggaraan pemerintahan negara maupun daerah dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut tentu menimbulkan hak dan kewajiban yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan dan kinerja yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab yang lebih jauh dijabarkan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, efektif dan efisien, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah menjadi sangat penting.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang didasari dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Konsekuensi logis dari pelaksanaan Undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan merumuskan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik yang prima sesuai kewenangan dan karakteristik daerah yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai perwujudan terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan tugas misi organisasi untuk mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam yang merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja



1.2.1. Tata Kerja

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Batam (Kelas 15) dan membawahi 3 (tiga) Asisten, yaitu : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota Batam dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota Batam.

Selanjutnya fungsi yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Keseluruhan fungsi tersebut diatas, dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh 3 (tiga) Asisten sesuai dengan bidang serta lingkup pelaksanaannya, yaitu :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam urusan perumusan kebijakan, mengoordinasikan bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, hukum dan Sekretariat DPRD serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, Kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil serta koordinasi kerukunan umat beragama.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan tugas mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan

kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, kebudayaan, pariwisata, koperasi usaha mikro, penanaman modal, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta urusan penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Asisten Administrasi Umum melaksanakan tugas dalam membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, serta tata usaha pimpinan dan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan serta Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Menurut Peraturan Walikota Batam Nomor 64 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam terdiri dari Sekretariat Daerah, 3 Asisten dan 12 Bagian secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

- a. **Sekretaris Daerah Kota, yang membawahi :**
- b. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1 (Kelas 14), yang terdiri dari:**
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
 - a) Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kelas 12);
 - b) Kelompok Jabatan fungsional :
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Pertama;

- 3) Arsiparis Ahli Pertama;
- 4) Arsiparis Terampil;
- 5) Pranata Komputer Ahli Pertama;
- 6) Surveyor Pemetaan Ahli Pertama.

c) Kelompok Jabatan Pelaksana :

- 1) Analis Batas Wilayah;
- 2) Analis pemerintahan Daerah;
- 3) Analis pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
- 4) Pengadministrasi Batas Wilayah;
- 5) Pengadministrasi Otonomi Daerah;
- 6) Pengadministrasi Pemerintahan;
- 7) Pengelola Administrasi Pemerintahan;
- 8) Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

a) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kelas 12);

b) Kelompok Jabatan Fungsional;

- 1) Analis Kebijakan Ahli Muda;
- 2) Analis Kebijakan Ahli Pertama;
- 3) Pranata Komputer Ahli pertama;
- 4) Pranata Komputer Terampil.

c) Kelompok Jabatan Pelaksana;

- 1) Analis Data dan Informasi;
- 2) Analis Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 4) Analis Rencana Program dan Kegiatan;
- 5) Pengelola Bantuan dan Keagamaan;
- 6) Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah;
- 7) Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan;
- 8) Pranata Kearsipan;
- 9) Pranata Teknologi Informasi Komputer.

3. Bagian Kerja Sama, membawahi :

a) Kepala Bagian Kerja Sama (Kelas 12);

b) Kelompok Jabatan fungsional;

- 1) Analis Hukum Ahli Pertama;
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 3) Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 4) Arsiparis Ahli Pertama;
 - 5) Penerjemah Ahli Pertama;
 - 6) Pranata Komputer Ahli Pertama.
- c) Kelompok Jabatan pelaksana;
- 1) Analis Kerja Sama Lintas Sektor;
 - 2) Analis Kerja Sama Luar Negeri;
 - 3) Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 4) Analis Perencanaan dan Kerja Sama;
 - 5) Pengelola Data;
 - 6) Pengelola Program dan Kegiatan.
4. Bagian Hukum, membawahi :
- a) Kepala Bagian Hukum (Kelas 12);
- b) Kelompok Jabatan Fungsional;
- 1) Analis Hukum Ahli Madya;
 - 2) Analis Hukum Ahli Muda;
 - 3) Analis Hukum Ahli Pertama;
 - 4) Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 5) Arsiparis Ahli Pertama;
 - 6) Penyuluh Hukum pertama;
 - 7) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya;
 - 8) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda;
 - 9) Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama;
 - 10) Pranata Komputer Ahli pertama.
- c) Kelompok Jabatan pelaksana;
- 1) Analis Advokasi hukum;
 - 2) Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 3) Analis Produk Hukum;
 - 4) Analis Sistem Informasi;
 - 5) Pengadministrasi Hukum;
 - 6) Pengelola Bantuan Hukum;

- 7) Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum;
- 8) Penyusunan Bahan Bantuan Hukum;
- 9) Penyusunan Bahan Informasi dan Publikasi;
- 10) Penyusunan Rancangan Perundang-Undangan.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Kelas 14), yang terdiri dari:

- 1. Bagian Perekonomian, membawahi :
 - a) Kepala Bagian Perekonomian (Kelas 12)
 - b) Kelompok Jabatan fungsional;
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 2) Analis Kebijakan Ahli pertama;
 - 3) Analis Perdagangan Ahli Pertama;
 - 4) Arsiparis Ahli Pertama;
 - 5) Perencana Ahli Muda;
 - 6) Perencana Ahli Pertama;
 - 7) Pranata Komputer Terampil.
 - c) Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - 1) Analis kemitraan;
 - 2) Analis Pengawasan;
 - 3) Analis Perekonomian;
 - 4) Analis Perencanaan;
 - 5) Pengadministrasi Umum;
 - 6) Pengelola Data.
- 2. Bagian Sumber Daya Alam, membawahi :
 - a) Kepala Bagian Sumber Daya Alam (Kelas 12);
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 3) Pranata Komputer Ahli Pertama.
 - c) Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - 1) Analis Barang Milik Negara;
 - 2) Analis Ketahanan Energi;
 - 3) Analis Lingkungan Hidup;
 - 4) Penata Keuangan;

- 5) Penelaah Data Sumber Daya Alam;
 - 6) Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam.
3. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
- a) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Kelas 12);
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Madya;
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 3) Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 4) Arsiparis Ahli Pertama;
 - 5) Perencana Ahli Muda;
 - 6) Perencana Ahli Pertama;
 - 7) Pranata Komputer Ahli Muda;
 - 8) Pranata Komputer Ahli Pertama;
 - 9) Pranata Komputer Terampil.
 - c) Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - 1) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Analis Rencana Program dan Kegiatan.
4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
- a) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Kelas 12);
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 2) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama;
 - 3) Arsiparis Ahli Pertama;
 - 4) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya;
 - 5) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda;
 - 6) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama;
 - 7) Pranata Komputer Ahli Muda;
 - c) Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - 1) Analis Klasifikasi Barang;
 - 2) Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - 3) Pengendali Teknologi Informasi;
 - 4) Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 5) Pengelola Pengadaan Barang Milik Negara;
 - 6) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

- 7) Pengelola Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD;
- 8) Pengelola Sistem dan Jaringan;
- 9) Pengelola Teknologi dan Informasi;
- 10) Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
- 11) Pranata kearsipan;
- 12) Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

d. Asisten Administrasi Umum (Kelas 14) yang terdiri dari:

1. Bagian Umum, membawahi :

- a) Kepala Bagian Umum (Kelas 12);
- b) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 3) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda;
 - 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama;
 - 5) Arsiparis Ahli Pertama;
 - 6) Arsiparis Terampil;
 - 7) Perencana Ahli Muda;
 - 8) Perencana Ahli Pertama;
 - 9) Pranata Komputer Ahli pertama;
 - 10) Pranata Komputer Terampil;
 - 11) Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil
- c) Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - 1) Analis Barang Milik Negara;
 - 2) Analis Pengembangan SDM Aparatur;
 - 3) Analis Rencana Program dan Kegiatan;
 - 4) Analis Sistem Informasi;
 - 5) Analis Tata Usaha;
 - 6) Penata Keuangan;
 - 7) Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 8) Nahkoda Kapal Kelas V;
 - 9) Pengelola Barang Persediaan;
 - 10) Pengelola Keuangan;

- 11) Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana;
 - 12) Pengelola Perbengkelan dan Pengujuan Kendaraan Bermotor;
 - 13) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - 14) Pengelola Surat;
2. Bagian Organisasi, membawahi :
- a) Kepala Bagian Organisasi (Kelas 12);
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1) Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 2) Analis Kebijakan Ahli Pertama;
 - 3) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda;
 - 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama;
 - 5) Arsiparis Terampil;
 - 6) Pranata Komputer Ahli Muda;
 - 7) Pranata Komputer Ahli pertama.
 - c) Kelompok Jabatan Pelaksana
 - 1) Analis Barang Milik Negara;
 - 2) Analis jabatan;
 - 3) Analis Kelembagaan;
 - 4) Analis Kinerja;
 - 5) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - 6) Analis Organisasi;
 - 7) Analis Pelayanan Publik
 - 8) Analis Tata laksana;
 - 9) Penata Keuangan;
 - 10) Pengawas Pelayanan Publik;
 - 11) Pegelola Akuntabilitas;
 - 12) Pengolah Data Kelembagaan;
 - 13) Penyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria.
3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi :
- a) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan (Kelas 12);
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya;
 - 2) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda;

- 3) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli pertama;
 - 4) Perencana Ahli Madya;
 - 5) Perencana Ahli Muda;
 - 6) Perencana Ahli Pertama;
 - 7) Pranata computer Ahli Pertama.
- c) Kelompok Jabatan Pelaksana;
- 1) Analis Keuangan;
 - 2) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - 3) Analis Perbendaharaan;
 - 4) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 5) Analis Rencana Program dan Kegiatan;
 - 6) Bendahara;
 - 7) Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris;
 - 8) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran;
 - 9) Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
4. Bagian Protokol, membawahi :
- a) Kepala Bagian Protokol (Kelas 12);
- b) Kelompok Jabatan fungsional;
- 1) Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - 2) Analis Kebijakan Ahli pertama;
 - 3) Arsiparis Mahir;
 - 4) Arsiparis Terampil;
 - 5) Penerjemah Ahli Pertama;
 - 6) Pranata Hubungan Masyarakat Pertama;
 - 7) Pranata Komputer Mahir.
- c) Kelompok Jabatan Pelaksana;
- 1) Analis Tata Usaha;
 - 2) Notulis Rapat;
 - 3) Pengadministrasi Keuangan;
 - 4) Pengadministrasi persuratan;
 - 5) Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi;
 - 6) Pengelola Dokumentasi;
 - 7) Penyusun Naskah Rapat pimpinan.
- d) Kepala Sub Kegiatan Protokol (Kelas 9)

- e) Analis Protokol
- f) Petugas Protokol
- g) Petugas Keamanan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam dalam upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraannya, serta terciptanya pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam secara terukur selama Tahun 2024.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 adalah:

- 1) Memberikan gambaran tentang capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam selama Tahun 2024.
- 2) Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batam Tahun 2024.

1.4. Landasan Hukum

Landasan yang menjadi dasar dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 042);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 052);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Kode Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;

17. Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
18. Peraturan Walikota Batam Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Batam.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 dengan sistematika yang dianjurkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 LANDASAN HUKUM
- 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 RENCANA STRATEGIS
- 2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2024
- 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
- 2.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- 3.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
- 3.3 CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

- 4.1. KESIMPULAN
- 4.2. SARAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Batam, dan mengingat perubahan dinamika masyarakat yang begitu cepat yang pada dasarnya menuntut pelaksanaan pemerintahan yang baik dan dapat memberikan pelayanan yang prima dari aparatur Sekretariat Daerah Kota Batam, maka sesuai dengan Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 , telah disusun rumusan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Batam sebagai berikut:

2.1.1. Visi Pemerintah Kota Batam

Visi merupakan inspirasi dari motivasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan apa yang ingin dicapai dimasa depan, sedangkan misi diperlukan sebagai pedoman didalam pengambilan keputusan manajemen. Visi Kota Batam periode 2021-2026 dirumuskan dengan memperhatikan kemajuan yang telah dicapai pemerintahan periode sebelumnya, berbagai permasalahan serta isu-isu strategis pembangunan daerah di masa mendatang. Visi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 juga diacu dalam perumusan visi jangka menengah ini. Karenanya, maka rumusan Visi Kota Batam periode 2021-2026 adalah

**“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR
DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”**

Visi tersebut mengandung empat pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2026, yaitu “Bandar Dunia”, “Madani”, “Modern” dan “Sejahtera”. Pokok visi “Bandar Dunia”, “Madani”, dan “Sejahtera” menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai di tahun 2026, sementara pokok visi “Modern” menunjukkan penekanan cara atau ‘bagaimana’ untuk mencapai ketiga pokok visi lainnya. Makna terinci dari keempat pokok visi di atas adalah sebagai berikut:

- a) **“Bandar Dunia”** mengandung makna Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia

Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi "center of excellence".

- b) **“Madani”** bermakna pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, ber peradaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep civil society yang religius.
- c) **“Sejahtera”** mengandung makna kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada.
- d) **“Modern”** mengandung makna sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

2.1.2. Misi Pemerintah Kota Batam Kota Batam

Mengacu pada Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026, serta analisis terhadap isu-isu strategis dan permasalahan yang diuraikan pada bab sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan misi, Untuk mencapai visi **“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”**, beberapa misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021-2026 telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam. Misi penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Government) pertama dan keempat, Kota Batam sebagai “Bandar Dunia” yang “Modern”. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi "center of excellence" di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan

pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah.

- 2) Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang. Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok visi Kota Batam sebagai “Bandar Dunia” yang “Modern”. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta centre of excellence di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni.
- 3) Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” dan “Modern”, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.
- 4) Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” sekaligus “Bandar Dunia” yang “Modern”. Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang “sejahtera” akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah hinterland, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah mainland/kota.

- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Madani” yang “modern”, yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berbanding lurus dengan konsep civil society yang tetap mengedepankan sikap religius. Permasalahan permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam.

Tabel 1
Visi dan Misi

POKOK VISI	PENJELASAN	MISI
Bndar Dunia	Kota Batam diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi "center of excellence".	1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
		2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyaman sesuai Tata Ruang.
Madani	Pembangunan Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep civil society.	3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sejahtera	kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada.	4. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.
		5. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam.
Modern	sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan. POKOK VISI INI MERUPAKAN FOKUS/CARA/STRATEGI UNTUK MENCAPAI VISI	

Sumber: RPJMD KOTA BATAM 2021-2026

2.2. Tujuan dan Sasaran

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota atau provinsi dengan kabupaten dan kota, diatur berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, diselenggarakan berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang. Salah satu yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian peranan dan fungsi serta kinerja Sekretariat Daerah begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah. Tujuan, dan Sasaran yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja suatu Instansi Pemerintah yang dapat menunjang Visi dan Misi Walikota Batam. Bab ini memuat tujuan dan sasaran RENSTRA Sekretariat Daerah Kota Batam yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Batam, dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program pada 12 Bagian yang terdapat di Sekretariat Daerah Kota Batam. Untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Tujuan Dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)	
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas				Nilai LPPD		Suatu Nilai yang diberikan Pemerintah Pusat Terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil Nilai yang diberikan oleh Pemerintah Pusat		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
	1. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah			Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian		Hasil Survei Kepuasan Layanan Kesekretariatian Daerah	Hasil Olahan Data Survei Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatian Daerah		82%		88.31%		89%		90%		91%		92%		92%	
		SEKRETARIAT DAERAH																				

		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM		1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah		Hasil Survei Kepuasan Layanan Administrasi Umum	Hasil Olahan Data Survei Kepuasan Terhadap Layanan Administrasi Umum	67.13	60-70	108,063,376,453	60-70	135,831,066,282	70-80	135,831,068,282	70-80	135,831,068,282	80-90	151,186,899,444	80-90	156,857,624,436	80-90	823,601,103,179
				2. Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB		Suatu Nilai yang diberikan Pemerintah Pusat Terkait dengan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Hasil Nilai yang diberikan oleh Pemerintah Pusat	NA	30%	2,099,368,000	25%	2,637,930,600	20%	2,637,930,600	15%	2,637,930,600	10%	2,637,930,600	5%	2,837,930,600	5%	15,489,021,000
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dibagi dengan Hasil Dokumen Perencanaan di kali 100%	100%	100%	45,750,000	100%	224,699,820	100%	224,699,820	100%	224,699,820	100%	249,585,961	100%	577,766,465	100%	1,547,201,886
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	31,750,000	1 Dokumen	132,428,820	1 Dokumen	132,428,820	1 Dokumen	132,428,820	1 Dokumen	153,910,161	1 Dokumen	159,804,920	6 Dokumen	742,751,541
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi SKPD yang tersusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	14,000,000	1 Laporan	92,271,000	1 Laporan	92,271,000	1 Laporan	92,271,000	1 Laporan	95,675,800	1 Laporan	417,961,545	1 Laporan	804,450,345
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Hasil Dokumen Administrasi Keuangan yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun dibagi dengan Hasil Dokumen Administrasi Keuangan di kali 100%	100%	100%	32,846,064,596	100%	46,149,444,760	100%	45,157,426,760	100%	45,157,426,760	100%	51,562,239,785	100%	53,448,407,342	100%	274,321,010,003

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN dilingkungan SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dilingkungan SKPD	179 orang	179 orang	32,508,444,596	184 orang	45,726,754,360	189 orang	44,734,736,360	194 orang	44,734,736,360	199 orang	51,123,952,109	204 orang	52,993,333,248	204 orang	271,821,957,033
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	18 Kegiatan	18 Kegiatan	337,620,000	12 Dokumen	422,690,400	12 Dokumen	422,690,400	12 Dokumen	422,690,400	12 Dokumen	438,287,676	12 Dokumen	455,074,094	12 Dokumen	2,499,052,970
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Hasil Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Jumlah Rencana Kegiatan Kepegawaian yang dibagi dengan hasil kegiatan kepegawaian yang ada dikali 100%				100%	518,974,000	100%	1,159,234,000	100%	1,159,234,000	100%	1,649,768,756	100%	1,387,039,944	100%	5,874,250,700
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian dinas						430 Paket	640,260,000	430 Paket	640,260,000	430 Paket	788,510,000	430 Paket	788,510,000	430 Paket	2,857,540,000
		Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan		Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek				22 Orang	518,974,000	22 Orang	518,974,000	22 Orang	518,974,000	22 Orang	861,258,756	22 Orang	598,529,944	110 Orang	3,016,710,700
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah rencana Penyediaan Administrasi Umum dibagi hasil Penyediaan Administrasi dikali 100%	100%	100%	21,209,205,000	100%	19,025,363,447	100%	19,025,363,447	100%	19,025,363,447	100%	19,727,399,358	100%	20,482,958,754	100%	118,495,653,453
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	6 Paket	2,122,529,500	7 Paket	2,251,870,900	7 Paket	2,251,870,900	7 Paket	2,251,870,900	7 Paket	2,334,964,936	7 Paket	2,424,394,093	7 Paket	13,637,501,229
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	10 Jenis	10 Paket	10,430,812,900	9 Paket	4,060,481,297	9 Paket	4,060,481,297	9 Paket	4,060,481,297	9 Paket	4,210,313,057	9 Paket	4,371,568,047	9 Paket	31,194,137,895

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	2 Jenis	2 Paket	995,500,100	1 Paket	755,007,750	1 Paket	755,007,750	1 Paket	755,007,750	1 Paket	782,867,536	1 Paket	812,851,363	1 Paket	4,856,242,249
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1600 Kali Perjalanan	12 Laporan	7,660,362,500	12 Laporan	11,958,003,500	12 Laporan	11,958,003,500	12 Laporan	11,958,003,500	12 Laporan	12,399,253,829	12 Laporan	12,874,145,251	12 Laporan	68,807,772,080
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Yang Terlaksana	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Yang Terlaksana	Hasil Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Yang Terlaksana	Jumlah Rencana Pengadaan Barang Milik Daerah dibagi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah dikali 100%	100%	100%	9,458,380,000	100%	8,544,920,770	100%	8,544,920,770	100%	8,544,920,770	100%	9,491,294,921	100%	9,854,811,516	100%	54,439,248,747
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	15 Unit	15 Unit	6,749,370,000	15 Unit	2,152,977,000	15 Unit	2,152,977,000	15 Unit	2,152,977,000	15 Unit	2,232,421,851	15 Unit	2,317,923,608	15 Unit	17,758,646,459
		Pengadaan Mebel		Jumlah jenis Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel	6 Jenis	6 Paket	1,017,350,000	245 Paket	885,482,000	245 Paket	885,482,000	245 Paket	885,482,000	245 Paket	1,549,222,861	245 Paket	1,608,558,096	245 Paket	6,831,576,957
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Jenis	12 Unit	1,691,660,000	160 Unit	5,506,461,770	160 Unit	5,506,461,770	160 Unit	5,506,461,770	160 Unit	5,709,650,209	160 Unit	5,928,329,812	160 Unit	29,849,025,331
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rencana Penyediaan Jasa Penunjang dibagi Hasil Penyediaan Jasa Penunjang dikali 100%	100%	100%	20,358,493,440	100%	25,731,361,820	100%	25,731,361,820	100%	25,731,361,820	100%	28,581,182,941	100%	29,675,842,248	100%	155,809,604,089
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Jenis	12 Laporan	7,872,760,000	12 Laporan	8,915,320,300	12 Laporan	8,915,320,300	12 Laporan	8,915,320,300	12 Laporan	9,244,295,619	12 Laporan	9,598,352,141	12 Laporan	53,461,368,660

		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor		Jumlah jenis Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	8 Jenis	12 Lapora n	801,30 0,000	12 Laporan	2,392,0 00,000	12 Lapora n	2,392, 000,00 0	12 Laporan	2,392,000, 000	12 Lapora n	4,380, 598,6 70	12 Laporan	4,548,3 75,600	12 Lapora n	16,906,274,270
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah THD tang menerima honorarium	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	272 Orang	12 Lapora n	11,684, 433,44 0	12 Laporan	14,424, 041,520	12 Lapora n	14,424 ,041,5 20	12 Laporan	14,424,041 ,520	12 Lapora n	14,95 6,288, 652	12 Laporan	15,529, 114,507	12 Lapora n	85,441,961,159
		Kegiatan Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah		Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	Persentase Kegiatan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Yang Terlaksana	Hasil Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	Jumlah Rencana Pemeliharaaa n BMD dibagi dengan Hasil Pemeliharaa n BMD dikali 100%	100%	100%	15,294, 480,42 8	100%	23,397, 974,020	100%	23,749 ,734,0 20	100%	23,749,734 ,020	100%	26,34 1,125, 841	100%	27,336, 518,553	100%	139,869,566,88 2
		Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						9 Unit	351,76 0,000	9 Unit	351,760,00 0	9 Unit	351,7 60,00 0	9 Unit	351,760 ,000	9 Unit	1,407,040,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah jenis Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara atau Lapangan	9 Jenis	9 Unit	5,665,3 41,600	120 unit	12,061, 034,532	120 unit	12,061 ,034,5 32	120 unit	12,061,034 ,532	120 unit	12,50 6,086, 706	120 unit	12,985, 069,827	120 unit	67,339,601,729
		Pemeliharaa n/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas i	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	5 jenis	5 Unit	9,629,1 38,828	10 Unit	11,336, 939,488	10 Unit	11,336 ,939,4 88	10 Unit	11,336,939 ,488	10 Unit	13,48 3,279, 135	10 Unit	13,999, 688,726	10 Unit	71,122,925,153

		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi sesuai dengan ketentuan	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terpenuhi sesuai ketentuan	Hasil Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil nya yang terpenuhi	Jumlah Rencana Administrasi Keuangan Kepala Daerah dibagi hasil Administrasi Keuangan dikali 100%	100%	100%	5,537,208,289	100%	5,654,736,767	100%	5,654,736,767	100%	5,654,736,767	100%	6,281,014,862	100%	6,521,577,732	100%	35,304,011,184
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Kepala Daerah dan Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	3,787,208,289	2 Orang/Bulan	3,806,933,337	2 Orang/Bulan	3,806,933,337	2 Orang/Bulan	3,806,933,337	2 Orang/Bulan	3,947,409,177	2 Orang/Bulan	4,098,594,949	2 Orang/Bulan	23,254,012,426
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Kepala Daerah dan Bulan Penyediaan Dana Penunjang Operasional	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	1,750,000,000	2 Orang/Bulan	1,847,803,430	2 Orang/Bulan	1,847,803,430	2 Orang/Bulan	1,847,803,430	2 Orang/Bulan	2,333,605,685	2 Orang/Bulan	2,422,982,783	2 Orang/Bulan	12,049,998,758
		Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi sesuai ketentuan	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi sesuai ketentuan	Hasil Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi sesuai ketentuan	Jumlah Rencana Kebutuhan Rungga dibagi Hasil Kebutuhan Rungga dikali 100%	100%	100%	1,877,364,700	100%	4,197,150,878	100%	4,197,150,878	100%	4,197,150,878	100%	4,661,997,212	100%	4,840,551,706	100%	23,971,366,252
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah jenis Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang ada sesuai ketentuan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	8 Jenis	8 Paket	952,723,100	8 Paket	2,259,053,246	8 Paket	2,259,053,246	8 Paket	2,259,053,246	8 Paket	2,652,383,777	8 Paket	2,753,970,077	8 Paket	13,136,236,692
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Jenis Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang ada sesuai ketentuan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	8 Jenis	8 Paket	924,641,600	8 Paket	1,938,097,632	8 Paket	1,938,097,632	8 Paket	1,938,097,632	8 Paket	2,009,613,435	8 Paket	2,086,581,629	8 Paket	10,835,129,560

		Kegiatan Penataan Organisasi		1. Jumlah SOP di lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan; 2. Jumlah PD yang memiliki PMPRB berkategori Baik; 3. Jumlah PD dengan nilai IKM berkategori Baik	1. Persentase Jumlah SOP di lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan; 2. Persentase Jumlah PD yang memiliki PMPRB berkategori Baik; 3. Persentase Jumlah PD dengan nilai IKM berkategori Baik	1. SOP yang diterapkan 2. Indeks PMPRB Perangkat Daerah berkategori Baik 3. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah berkategori Baik	1. Jumlah SOP yg diterapkan dibagi jumlah keseluruhan SOP di Kota Batam 2. Hasil Nilai yang didapat dari Penilaian TPI/APIP 3. Hasil Nilai yang didapat dari Pengolahan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	2,099,368,000	100%	2,637,930,600	100%	2,637,930,600	100%	2,637,930,600	100%	2,837,930,600	100%	15,489,021,000
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah dokumen Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan, Maturitas Kelembagaan dan Evaluasi Tusi yang disahkan.	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang tersusun	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 dokumen (Anjab, Evjab, Kelembagaan, Tusi)	4 Dokumen	445,474,000	4 Dokumen	710,891,100	4 Dokumen	710,891,100	4 Dokumen	710,891,100	4 Dokumen	837,085,487	4 Dokumen	4,126,123,887
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah SOP, PROBIS dan Aplikasi SPBE yang diterapkan;	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen (2 PROBIS, 1 SOP, 1 SPBE)	3 Laporan	483,612,000	3 Laporan	651,410,600	3 Laporan	651,410,600	3 Laporan	651,410,600	3 Laporan	676,359,626	3 Laporan	3,765,614,026
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah dokumen Rencana Aksi RB;	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang tersusun	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	45 Dokumen RB	44 Dokumen	402,800,000	44 Dokumen	195,211,600	44 Dokumen	195,211,600	44 Dokumen	195,211,600	44 Dokumen	202,688,204	44 Dokumen	1,386,334,604
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Kepuasan Masyarakat, Standar Pelayanan Publik dan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang tersusun	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	44 Dok SKM, 1 Dok SPP, dan 3 Dok Ev Pelayanan Publik	1 Dokumen	602,932,000	1 Dokumen	788,694,100	1 Dokumen	788,694,100	1 Dokumen	788,694,100	1 Dokumen	818,901,084	1 Dokumen	4,576,609,484
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen SAKIP dan Pengukuran Kinerja yang disusun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	45 Dok SAKIP dan 44 Dok PK	1 Dokumen	164,550,000	1 Dokumen	291,723,200	1 Dokumen	291,723,200	1 Dokumen	291,723,200	1 Dokumen	302,896,199	1 Dokumen	1,634,338,999

		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	Hasil Kegiatan Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	Jumlah Rencana Kegiatan Keprotokolan Pimpinan dibagi Hasil Kegiatan Keprotokolan Pimpinan dikali 100%	100%	100%	1,436,430,000	100%	2,386,440,000	100%	2,386,440,000	100%	2,386,440,000	100%	2,641,289,807	100%	2,732,150,176	100%	13,969,189,983
		Fasilitasi Keprotokolan		1. Persentase tamu kepala/wakil kepala daerah yang difasilitasi; 2. Jumlah frekuensi kegiatan audiensi kepala/wakil kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	100% dan 24 Audensi	50 Laporan	1,436,430,000	50 Laporan	2,386,440,000	50 Laporan	2,016,440,000	50 Laporan	2,016,440,000	50 Laporan	2,016,440,000	50 Laporan	2,083,368,621	50 Laporan	11,955,558,621
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah notulensi Komunikasi Pimpinan yang disusun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						36 Laporan	250,000,000	36 Laporan	250,000,000	36 Laporan	500,421,807	36 Laporan	519,587,962	36 Laporan	1,520,009,769
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Persentase kegiatan kepala/wakil kepala daerah yang didokumentasikan	Jumlah Laporan Pendokumen Tasian Tugas Pimpinan	Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumen Tasian Tugas Pimpinan						2 Laporan	120,000,000	2 Laporan	120,000,000	2 Laporan	124,428,000	2 Laporan	129,193,593	2 Laporan	493,621,593
	2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Peringkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam			1. Nilai SAKIP		Suatu Nilai yang diberikan Pemerintah Pusat Terkait dengan Penyelenggaraan SAKIP	Hasil Nilai yang diberikan oleh Pemerintah Pusat		B		B		B		BB		BB		BB		BB	
				2. Persentase Ketidakesuaian PMPRB dengan Indeks RB		Suatu Nilai yang diberikan Pemerintah Pusat Terkait dengan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Hasil Nilai yang diberikan oleh Pemerintah Pusat		30%		25%		20%		15%		10%		5%		5%	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		1. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan		Hasil Produk Hukum yang diterapkan	Jumlah Rencana Produk Hukum yang ditetapkan dibagi Hasil Produk Hukum	100%	100%	345,000,000	100%	536,235,500	100%	554,682,001	100%	574,428,681	100%	595,625,099	100%	618,437,540	100%	3,224,408,821

							yang ditetapkan dikali 100%															
				2. Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat		Hasil Survei Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	Hasil Olahan Data Survei Kepuasan Terhadap Layanan Kesejahtera an Rakyat	67.13	60-70	65,046, 168,50 0	60-70	70,371, 609,500	70-80	74,392 ,392,8 67	70-80	77,583,802 ,053	80-90	80,71 5,464, 348	80-90	83,760, 859,752	80-90	451,870,297,02 0
				3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Tata Pemerintahan yang Ditindaklanjuti		Hasil Rekomendasi kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Jumlah Rencana Rekomenda si Kebijakan Tata Pemerintah an yg ditindaklan juti dibagi Hasil Rekomenda si Kebijakan Tata Pemerintah an yg ditindaklan juti dokali 100%	100%	100%	6,991,7 37,800	100%	6,806,1 82,650	100%	7,040, 315,33 3	100%	7,290,950, 559	100%	7,559, 986,6 35	100%	7,849,5 34,123	100%	43,538,707,100
				4. Persentase MoU yang ditindaklanjuti		suatu Hasil Mul yang ditindaklanjuti	Jumlah Rencana MoU yang ditindaklan juti dibagi Hasil MoU yang ditindaklan juti	100%	100%	413,56 8,000	100%	548,158 ,250	100%	867,01 4,894	100%	897,880,62 4	100%	931,0 12,41 9	100%	1,565,0 12,076	100%	5,222,646,263
		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintah an		Persentase penyampaian laporan LPPD dan RLPPD tepat waktu	Persentase penyampaia n laporan LPPD dan RLPPD tepat waktu	Hasil penyampaian laporan LPPD dan RLPPD tepat waktu	Jumlah Rencana Laporan LPPD dibagi Hasil Laporan LPPD dikali 100%	100%	100%	6,991,7 37,800	100%	6,806,1 82,650	100%	7,040, 315,33 3	100%	7,290,950, 559	100%	7,559, 986,6 35	100%	7,849,5 34,123	100%	43,538,707,100
		Penataan Administrasi Pemerintah an		1. Jumlah rapat koordinasi Forkopimda; yang difasilitasi 2. Jumlah peserta Bimtek pembinaan dan penataan administrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan LKK	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah an	Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah an	12 Kali Rapat, 500 orang dan 1 Dok Monit oring LKK	12 Doku men	2,612,4 12,800	12 Dokume n	2,640,8 70,000	12 Doku men	2,731, 715,92 8	12 Dokume n	2,828,965, 015	12 Dokum en	2,933, 353,8 24	12 Dokume n	3,045,7 01,276	12 Doku men	16,793,018,843

		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		1. Jumlah peserta sosialisasi administrasi kewilayahan; 2. Jumlah laporan kegiatan yang ada di lokasi prioritas kecamatan perbatasan.	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	200 orang dan 1 laporan monitoring Kewilayahan	1 Dokumen	582,860,000	1 Dokumen	765,880,000	1 Dokumen	792,226,272	1 Dokumen	820,429,527	1 Dokumen	850,703,377	1 Dokumen	883,285,316	1 Dokumen	4,695,384,492
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		1. Jumlah Dokumen LPPD yang disusun; 2. Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah; yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen LPPD dan 1 Kegiatan	2 Dokumen	3,796,465,000	2 Dokumen	3,399,432,650	2 Dokumen	3,516,373,133	2 Dokumen	3,641,556,017	2 Dokumen	3,775,929,434	2 Dokumen	3,920,547,531	2 Dokumen	22,050,303,765
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	Hasil Cakupan Lembaga Keagamaan dan Tokoh Keagamaan yang diberikan Layanan sesuai kebutuhan	Jumlah Rencana Cakupan Lembaga Keagamaan yang diberikan dibagi Hasil Cakupan Lembaga Keagamaan yang diberikan dikali 100%	100%	100%	65,046,168,500	100%	70,371,609,500	100%	74,392,392,867	100%	77,583,802,053	100%	80,715,464,348	100%	83,760,859,752	100%	451,870,297,020
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		1. Jumlah peserta pelatihan tokoh keagamaan; 2. Jumlah tokoh keagamaan yang diberikan insentif;	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	400 orang dan 5.980 orang	24 Dokumen	65,046,168,500	24 Dokumen	41,255,090,000	24 Dokumen	40,286,109,096	24 Dokumen	41,805,312,934	24 Dokumen	43,436,051,937	24 Dokumen	45,145,112,221	24 Dokumen	276,973,844,688

		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah lembaga keagamaan yang diberikan bantuan hibah;	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				200 Dokumen	17,890,360,000	200 Dokumen	18,505,788,384	200 Dokumen	19,164,594,450	200 Dokumen	20,140,587,985	200 Dokumen	20,911,972,505	200 Dokumen	96,613,303,324
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Kegiatan keagamaan yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				14 Dokumen	11,226,159,500	14 Dokumen	13,212,339,387	14 Dokumen	14,225,738,669	14 Dokumen	14,750,668,426	14 Dokumen	15,315,619,026	14 Dokumen	68,730,525,008

		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat						1440 Keluar ga	2,388, 156,00 0	1440 Keluarga	2,388,156, 000	1440 Keluarg a	2,388, 156,00 0	1440 Keluarg a	2,388,1 56,000	1440 Keluar ga	9,552,624,000
		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase produk hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasika n	Persentase produk hukum yang telah diharmonisa si dan disinkronisa sikan	Hasil Produk Hukum yang telah diharmonisasi dan disinkronisasik an	Jumlah Rencana Produk Hukum yang telah diharmonisa si dibagi Hasil Produk Hukum yang telah diharmonisa si dikali 100%	100%	100%	345,00 0,000	100%	536,235 ,500	100%	554,68 2,001	100%	574,428,68 1	100%	595,6 25,09 9	100%	618,437 ,540	100%	3,224,408,821
		Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah		Jumlah dokumen perda dan perkara yang disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah				410 Dokume n	1,575,0 00	410 Doku men	1,629, 180	410 Dokume n	1,687,179	410 Dokum en	1,749, 436	410 Dokume n	1,816,4 39	410 Doku men	8,457,234
		Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah perkara yang didampingi / juml perkara yang masuk	Jumlah Kasus yang Mendapatka n Fasilitas Bantuan Hukum	Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatka n Fasilitas Bantuan Hukum	6 Perkar a (2TUN & 4 Perdat a)	8 Kasus	345,00 0,000	8 Kasus	532,808 ,000	8 Kasus	551,13 6,595	8 Kasus	570,757,05 8	8 Kasus	591,8 17,99 3	8 Kasus	614,484 ,623	8 Kasus	3,206,004,269
		Pendokumen tasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah produk hukum yang didokumentasik an	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokument asi	Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				410 Dokume n	1,852,5 00	410 Doku men	1,916, 226	410 Dokume n	1,984,444	410 Dokum en	2,057, 670	410 Dokume n	2,136,4 78	410 Doku men	9,947,318
		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah		1. Persentase inisiasi Kerjasama yang menjadi MOU 2. Jumlah kegiatan Pembangunan Daerah yang dibiaya oleh Dana CSR	1. Persentase inisiasi Kerjasama yang menjadi MOU 2. Jumlah kegiatan Pembanguna n Daerah yang dibiaya oleh Dana CSR	1. Hasil Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitas Kerjasama Daerah 2. Hasil Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Kerjasana daerah dan Pelaksanaan Program TSP	Jumlah Rencana Fasilitas Kerjasama Daerah dibagi Hasil Fasilitas Kerjasama Daerah dikali 100%	100%	100%	413,56 8,000	100%	548,158 ,250	100%	867,01 4,894	100%	897,880,62 4	100%	931,0 12,41 9	100%	1,565,0 12,076	100%	5,222,646,263

		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		1. Jumlah inisiasi MoU Kerjasama Daerah DN; 2. Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan APEKSI	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	9 MOU 9 PKS	1 Dokumen	402,318,000	1 Dokumen	458,808,250	1 Dokumen	474,591,254	1 Dokumen	491,486,702	1 Dokumen	509,622,562	1 Dokumen	529,141,106	1 Dokumen	2,865,967,874
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		Jumlah inisiasi MoU Kerjasama Daerah LN;	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri						1 Dokumen	300,000,000	1 Dokumen	310,680,000	1 Dokumen	322,144,092	1 Dokumen	932,824,092	1 Dokumen	1,865,648,184
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Frekuensi rapat koordinasi forum CSR	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2 Rakor	1 Laporan	11,250,000	1 Laporan	89,350,000	1 Laporan	92,423,640	1 Laporan	95,713,922	1 Laporan	99,245,765	1 Laporan	103,046,878	1 Laporan	491,030,205
	3. Meningkatkan kualitas pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi			Persentase penerapan SOP di Lingkungan Pemerintah Kota Batam		SOP yang diterapkan di Pemerintah Kota Batam	Jumlah SOP yg diterapkan dibagi jumlah keseluruhan SOP di Kota Batam		80%		85%		90%		95%		100%		100%		100%	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian		Hasil Rekomendasi Kebijakan Perekonomian daerah yg ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Daerah dibagi Total Hasil Rekomendasi	100%	100%	505,925,000	100%	698,773,200	100%	722,814,205	100%	748,546,390	100%	776,167,752	100%	805,894,977	100%	4,258,121,524
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Administrasi Pembangunan		Hasil Rekomendasi Kebijakan Administrasi bidang SDA yg ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan dibagi Total Hasil Rekomendasi	90%	90%	100,200,000	90%	308,570,300	100%	319,185,119	100%	330,548,109	100%	342,745,333	100%	355,872,480	100%	1,757,121,341

				Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa		Nilai Hasil Survei Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Hasil Olahan Data Survei Kepuasan Terhadap Layanan Pengadaan Barang Jasa	67.13	60-70	747,557,100	60-70	1,606,050,600	70-80	1,661,298,741	70-80	1,720,440,976	80-90	1,783,925,248	80-90	1,852,249,584	80-90	9,371,522,249
				Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA yang Ditindaklanjuti			Jumlah Rencana Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA dibagi Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA dikali 100%	100%	100%		100%	22,705,850	100%	23,486,931	100%	24,323,066	100%	25,220,587	100%	26,186,536	100%	121,922,970
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Hasil Rekomendasi Kebijakan Perekonomian daerah yg ditindaklanjuti	Jumlah Rencana Kebijakan Perekonomian Daerah dibagi Hasil Kebijakan Perekonomian Daerah dikali 100%	100%	100%	505,925,000	100%	698,773,200	100%	722,814,205	100%	748,546,390	100%	776,167,752	100%	805,894,977	100%	4,258,121,524
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Frekuensi rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Rapat TPID	4 Laporan	422,812,000	4 Laporan	467,923,000	4 Laporan	484,022,758	4 Laporan	501,253,969	4 Laporan	519,750,240	4 Laporan	539,656,674	4 Laporan	2,935,418,641
		Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Jumlah frekuensi rapat koordinasi dengan KUR dan UMKM	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	5 Dokumen	38,879,200	5 Dokumen	38,879,200	5 Dokumen	40,216,644	5 Dokumen	41,648,356	5 Dokumen	43,185,181	5 Dokumen	44,839,173	5 Dokumen	208,768,554
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah laporan pengawasan BUMD dan BLUD;	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Laporan	5 Dokumen	83,113,000	6 Dokumen	191,971,000	6 Dokumen	198,574,803	6 Dokumen	205,644,065	6 Dokumen	213,323,331	6 Dokumen	221,399,130	6 Dokumen	1,113,934,329

		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase pelaporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase pelaporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Hasil Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan tepat waktu sesuai ketentuan	Jumlah Rencana Kegiatan Administrasi Pembangunan dibagi Hasil Kegiatan Administrasi Pembangunan dikali 100%	90%	90%	100,20 0,000	90%	308,570 ,300	100%	319,18 5,119	100%	330,548,10 9	100%	342,7 45,33 3	100%	355,872 ,480	100%	1,757,121,341
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Jumlah buku pedoman pelaksanaan kegiatan APBD yang disusun	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Buku	1 Dokumen		1 Dokumen	143,560 ,000	1 Buku	148,49 8,464	1 Buku	153,785,00 9	1 Buku	159,4 59,67 6	1 Buku	165,566 ,982	5 Buku	770,870,131
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah dokumen laporan pengendalian pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan Profil Pembangunan	1 Laporan	85,200, 000	1 Laporan	107,916 ,300	1 Laporan	111,62 8,621	1 Laporan	115,602,60 0	1 Laporan	119,8 68,33 5	1 Laporan	124,459 ,293	1 Laporan	664,675,149
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah laporan evaluasi pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	17 Laporan RFK	2 Laporan	15,000, 000	2 Laporan	57,094, 000	2 Laporan	59,058 ,034	2 Laporan	61,160,500	2 Laporan	63,41 7,322	2 Laporan	65,846, 205	2 Laporan	321,576,061
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Tingkat Kematangan UKPBJ (level)	Tingkat Kematangan UKPBJ (level)	Nilai yang diberikan oleh LKPP	Standart Penilaian dari LKPP	Level 3 untuk Variabel	Level 3 untuk Variabel	747,55 7,100	Level 4 untuk Variabel	1,606,0 50,600	Level 4 untuk Variabel	1,661, 298,74 1	Level 4 untuk Variabel	1,720,440, 976	Level 4 untuk Variabel	1,783, 925,2 48	Level 4 untuk Variabel	1,852,2 49,584	Level 4 untuk Variabel	9,371,522,249
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah paket PBJ yang diproses	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	242 Paket	500 Dokumen	139,52 0,000	400 Dokumen	125,485 ,000	400 Dokumen	129,80 1,684	400 Dokumen	134,422,62 4	400 Dokumen	139,3 82,81 9	400 Dokumen	144,721 ,180	400 Dokumen	813,333,307
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		1. Persentase Paket yang diumumkan melalui LPSE 2. Jumlah Penambahan Penyedia yang mendapatkan Fasilitas Layanan Registrasi dan Verifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100% dan 84 orang	50 Dokumen	512,41 9,100	50 Dokumen	1,194,8 65,600	50 Dokumen	1,235, 968,97 7	50 Dokumen	1,279,969, 472	50 Dokumen	1,327, 200,3 46	50 Dokumen	1,378,0 32,119	50 Dokumen	6,928,455,614

		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		1. Jumlah paket yang diasistensi; 2. Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek tentang PBJ.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 paket dan 1.250 orang	450 Orang	95,618,000	450 Orang	285,700,000	450 Orang	295,528,080	450 Orang	306,048,880	450 Orang	317,342,083	450 Orang	329,496,285	450 Orang	1,629,733,328
		Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber daya alam		Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	Hasil Rekomendasi Kebijakan bidang SDA yg ditindaklanjuti	Jumlah Rencana Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA dibagi Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang SDA	100%	100%	21,750,000	100%	66,834,100	100%	69,129,986	100%	71,591,014	100%	74,232,722	100%	77,075,836	100%	380,613,658
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang dirumuskan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan , Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan , dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan , Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	12 Laporan bulanan, 4 Laporan Triwulan dan 1 Laporan Tahunan	5 Dokumen	21,750,000	5 Dokumen	21,200,500	5 Dokumen	21,929,797	5 Dokumen	22,710,498	5 Dokumen	23,548,515	5 Dokumen	24,450,423	5 Dokumen	135,589,733
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang dirumuskan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan , dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		5 Dokumen	22,927,750	5 Dokumen	22,927,750	5 Dokumen	23,713,258	5 Dokumen	24,557,450	5 Dokumen	25,463,620	5 Dokumen	26,438,877	5 Dokumen	123,100,955

		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Energi dan Air yang dirumuskan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , Pertanahan	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi , dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , Pertanahan				5 Dokume n	22,705, 850	5 Doku men	23,486 ,931	5 Dokume n	24,323,066	5 Dokum en	25,22 0,587	5 Dokume n	26,186, 536	5 Doku men	121,922,970
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	-------------

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Batam 2021-2026

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target tahunan pada dokumen perencanaan jangka menengah sebagaimana yang terdapat dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026, maka ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang menjadi Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Daerah Kota Batam dengan Walikota Batam.

Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2024. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan	Persentase	90%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam	Nilai SAKIP/Hasil LKJIP	Nilai	BB
		Persentase Ketidaksesuaian PMPRB dengan Indeks RB	Persentase	15%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase penerapan SOP di lingkungan pemerintah Kota Batam	Persentase	95%

Sumber: Perjanjian Kinerja Setdako Batam 2024

4.3. Program Dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan yang terdapat di Sekretariat Daerah Kota Batam berjumlah 3 Program, yaitu 1.) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu sebesar Rp. 122.932.976.035 2.) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan total pagu sebesar Rp.133.512.286.400 3.) Program Perekonomian dan Pembangunan dengan total pagu sebesar Rp. 1.432.533.200. Jumlah Kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kota Batam sebanyak 19 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan. Total Pagu secara keseluruhan berdasarkan APBDP Sekretariat Daerah Kota Batam sebesar Rp, 257.877.795.635.

Tabel 4 Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	SATUAN	2024	
				TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6
	SEKRETARIAT DAERAH				257.877.795.635
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah;</i>	<i>Indeks dan</i>	1) 70-80;	122.932.976.035
		<i>Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB</i>	%	2) 20%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	196.679.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	94.900.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	101.779.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	%	100%	43.240.130.104
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	215 Orang/bulan	43.240.130.104
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	%	100%	227.295.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	20 Orang	227.295.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	20.786.674.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Kantor yang Disediakan	Paket	7 Paket	3.562.668.000
	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket	7 Paket	

	Kantor	Kantor yang Disediakan			10.477.327.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3 Paket	654.450.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Laporan	6.092.229.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	%	100%	450.852.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4 Unit	81.750.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9 Unit	369.102.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	19.301.087.600
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	9.076.030.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	722.200.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	9.502.857.600
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	25.714.994.950
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6 Unit	351.760.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	120 Unit	16.719.707.650
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10 Unit	8.643.527.300
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpenuhi Sesuai dengan Ketentuan	%	100%	6.088.583.081
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	2 Orang/Bulan	4.303.583.081
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	2 Orang/Bulan	1.785.000.000
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terasilitasi Sesuai Ketentuan	%	100%	4.802.845.800
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	8 Paket	2.701.484.400

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	8 Paket	2.101.361.400
10	Penataan Organisasi	1. Persentase Jumlah SOP di Lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan 2. Persentase Jumlah PD yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik; 3. Persentase Jumlah PD dengan Nilai IKM Berkategori Baik	%	100%	1.649.313.000
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	Dokumen	4 Dokumen	296.223.000
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	3 Laporan	415.826.000
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	44 Dokumen	48.199.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Dokumen	1 Dokumen	773.667.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1 Dokumen	115.398.000
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	%	100%	474.521.000
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	50 Laporan	298.275.000
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	36 Laporan	175.258.000
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	2 Laporan	988.000
B	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian;	Indeks	100%	133.512.286.400
		Persentase rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan;	%	100%	
12	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Penyampaian Laporan LPPD dan RLPPD Tepat Waktu	%	100	7.469.942.400
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Adminstrasi Pemerintahan	Dokumen	12 Dokumen	1.969.332.000
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1 Dokumen	172.968.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	2 Dokumen	5.327.642.400
13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	%	100	121.837.663.000
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	24 Dokumen	81.759.981.000

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	250 Dokumen	27.010.260.000
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	14 Dokumen	12.161.208.000
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	1068 Keluarga	906.214.000
14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang Telah Diharmonisasi dan disinkronisasikan	%	100%	715.031.000
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Daerah	DOKUMEN	410 Dokumen	9.815.000
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	KASUS	8 kasus	693.820.000
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	DOKUMEN	410 dokumen	11.396.000
15	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1. Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Daerah; 2. Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Kerja Sama Daerah dan Pelaksanaan Program TSP	%	100%	3.489.650.000
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	20 Dokumen	3.486.550.000
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1 Dokumen	1.550.000
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1 Laporan	1.550.000
C	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa	Indeks	70-80	1.432.533.200
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	%	100%	
16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	%	100%	618.108.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	6 Dokumen	158.734.000
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	4 Laporan	370.610.000
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	5 Dokumen	88.764.000

17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Pelaporan Pembangunan dan Sesuai	%	100%	129.341.000
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1 Dokumen	105.650.000
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1 Laporan	12.465.000
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	2 Laporan	11.226.000
18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (level)	level	Level 4 untuk 4 Variabel	647.234.200
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen	150 Dokumen	20.545.000
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	dokumen	250 Dokumen	569.008.200
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	orang	450 Orang	57.681.000
19	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti dan diterapkan	%	100%	37.850.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	5 Dokumen	13.590.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	5 Dokumen	11.825.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	5 Dokumen	12.435.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah ditetapkan sebagai berikut :

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi p rogres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut.

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	<50%	Sangat Rendah

Sumber: Bimbingan Teknis SmartID

Pada sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian Kinerja Organisasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas		Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	88.31%	89,01%	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
		1. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	<i>Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah;</i>	<i>1) 70-80;</i>	<i>89,01</i>	<i>100</i>	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			<i>Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB</i>	<i>2) 20%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	n/a	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
1			Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024

2			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	215 Orang/bulan	215 Orang/bulan	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KEGIATAN DITIADAKAN			Sangat Rendah	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
3			Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	20 Orang	16 Orang	80%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
4			Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Paket Peralatan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Paket Bahan Logisitk Kantor yang Disediakan	7 Paket	9 Paket	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
5			Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	KEGIATAN DITIADAKAN			Sangat Rendah	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	2 Unit	50%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	100,00%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
6			Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
7			Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laoangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	120 Unit	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
8			Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpenuhi Sesuai dengan Ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024

9			Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terasilitasi Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	6 Paket	75%	Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	7 Paket	87,50%	Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
10			1. Persentase Jumlah SOP di Lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan 2. Persentase Jumlah PD yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik; 3. Persentase Jumlah PD dengan Nilai IKM Berkategori Baik	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	3 Laporan	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	44 Dokumen	44 Dokumen	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
11			Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	50 Laporan	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024

			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	36 Laporan	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	2 Laporan	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
		2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam	Persentase rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian;	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Persentase rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan;	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
12			Persentase Penyampaian Laporan LPPD dan RLPPD Tepat Waktu	100	100	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
13			Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	100	98,66%	92,41%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24	24	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024

			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	200	222	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	14	14	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1440 Keluarga	1003 Keluarga	69,65%	Sedang	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
14			Persentase Produk Hukum yang Telah Diharmonisasi dan disinkronisasikan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Penyusunan Produk Hukum Daerah	410 Dokumen	215 Dokumen	88,10%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	8 kasus	9 Kasus	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	410 dokumen	757 Dokumen	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
15			1. Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Daerah; 2. Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Kerja Sama Daerah dan Pelaksanaan Program TSP	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024

			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa	70-80	89,01	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
16			Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
17			Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024

			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
18			Tingkat Kematangan UKPBJ (level)	Level 4 untuk 4 Variabel	-	-	-	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	225	214	95,10%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50	392	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	500	500	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
19			Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti dan diterapkan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	Sangat Tinggi	LKPJ SETDAKO TAHUN 2024

Sumber: RPJMD Kota Batam & E-Monev TW IV Bag. Adpemb

a) Kategori “Sangat Rendah”

Pada Tabel 5 Capaian Kinerja Organisasi terdapat 2 Sub kegiatan yang memiliki Kategori "**Sangat Rendah**" yaitu

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tidak Terlaksana karena anggaran atau pagu sudah NOL, dan Sub Kegiatan tersebut tidak dapat dihilangkan dikarenakan Sub Kegiatan sudah tercantum pada RPJMD Kota Batam
- 2) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan karena anggaran atau pagu sudah NOL, dan Sub Kegiatan tersebut tidak dapat dihilangkan dikarenakan Sub Kegiatan sudah tercantum pada RPJMD Kota Batam

b) Kategori “Rendah”

Pada tahun 2024 Tidak Terdapat Kategori “RENDAH” Kegiatan dan Sub Kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Batam cukup Maksimal.

c) Kategori “Sedang”

Capaian Kinerja Organisasi terdapat 2 Sub Kegiatan yang memiliki Kategori “Sedang” yaitu.

- 1) Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Sebesar 69,65% dikarenakan Insentif kepada Petugas pemandian dan pengkafanan jenazah belum dilakukan. Kegiatan sampai pada pembentukan SK penerima dan 2 x pelatihan, karena waktu yang terbatas (Mulai Perubahan APBD 2024). Solusinya ialah Pengusulan nama calon penerima insentif dilakukan sejak awal tahun anggaran 2024.

Selebihnya ada 52 Sub kegiatan yang memiliki kategori “**Tinggi**” dan “**Sangat Tinggi**” kegiatan tersebut terlaksana secara baik

3.2. Perbandingan Capaian Kinerja

Pada tahun 2022 Sekretariat Daerah memiliki 41 Sub Kegiatan 18 Kegiatan dengan jumlah program sebanyak 3 Program, untuk tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah Memiliki 55 Sub Kegiatan dan 19 Kegiatan serta 3 Program, untuk lebih jelasnya tertuang pada tabel 6 Perbandingan Capaian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 6 Tabel Perbandingan Capaian Kinerja

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	2023			NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	2024		
			Target	Realisasi	% Capaian				Target	Realisasi	% Capaian
			Berdasarkan permendagri 90								
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah;	1) 70-80;	89,01	100	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah;	1) 70-80;	89,01	100
		Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	2) 20%	0	0			Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	2) 20%	0	0
1.A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	1.A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
2.A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	2.A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang/bulan	160 Orang/bulan	100%		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	215 Orang/bulan	215 Orang/bulan	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KEGIATAN DITIADAKAN		
3.A	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	3.A	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang	13 Orang	100%		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	16 Orang	80%
4.A	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpenuhi Sesuai dengan Ketentuan	100%	100%	100%	4.A	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpenuhi Sesuai dengan Ketentuan	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	100%
5.A	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	5.A	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100%		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100%

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	100%		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	9 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
6.A	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%	6.A	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	KEGIATAN DITIADAKAN		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	62 Unit	62 Unit	100%		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	2 Unit	50%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78 Unit	72 Unit	92,30%		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	100,00 %
7.A	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	7.A	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
8.A	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	8.A	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	100%		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laoangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	126 Unit	126 Unit	100%		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laoangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	120 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	100%		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	100%
9.A	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terasilitasi Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	9.A	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terasilitasi Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	6 Paket	75%		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	6 Paket	75%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	7 Paket	87,50%		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	7 Paket	87,50%

10. A	Penataan Organisasi	1. Persentase Jumlah SOP di Lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan 2. Persentase Jumlah PD yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik; 3. Persentase Jumlah PD dengan Nilai IKM Berkategori Baik	100%	100%	100%	10.A	Penataan Organisasi	1. Persentase Jumlah SOP di Lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan 2. Persentase Jumlah PD yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik; 3. Persentase Jumlah PD dengan Nilai IKM Berkategori Baik	100%	100%	100%
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	3 Laporan	100%		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	3 Laporan	100%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	44 Dokumen	44 Dokumen	100%		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	44 Dokumen	44 Dokumen	100%
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
11. A	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	100%	100%	11.A	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	100%	100%
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	50 Laporan	100%		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	50 Laporan	100%
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	36 Laporan	100%		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	36 Laporan	100%

	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	2 Laporan	100%		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	2 Laporan	100%
B	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian;</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	B	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian;</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
		<i>Persentase rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan;</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			<i>Persentase rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan;</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
B.1	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Penyampaian Laporan LPPD dan RLPPD Tepat Waktu	100	100	100%	B.1	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Penyampaian Laporan LPPD dan RLPPD Tepat Waktu	100	100	100%
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Adminstrasi Pemerintahan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Adminstrasi Pemerintahan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	0	0,00%		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
B.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	100	98,66%	92,41%	B.2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	100	98,66%	96,16%
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen	24 Dokumen	100%		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen	24 Dokumen	100%

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	200 Dokumen	222 Dokumen	100%		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	250 Dokumen	250 Dokumen	100%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	14 Dokumen	14 Dokumen	100%		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1440 Dokumen	1003 Dokumen	69,65%		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	1068 Keluarga	904 Dokumen	84,64%
B.3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang Telah Diharmonisasi dan disinkronisasikan	100%	100%	100%	B.3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang Telah Diharmonisasi dan disinkronisasikan	100%	100%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Daerah	410 Dokumen	215 Dokumen	88,10%		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Daerah	410 Dokumen	410 Dokumen	88,10%

	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 kasus	9 Kasus	100%		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 kasus	9 Kasus	100%
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	410 dokumen	757 Dokumen	100%		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	410 dokumen	757 Dokumen	100%
B.4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1. Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Daerah; 2. Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Kerja Sama Daerah dan Pelaksanaan Program TSP	100%	100%	100%	B.4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1. Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Daerah; 2. Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Kerja Sama Daerah dan Pelaksanaan Program TSP	100%	100%	100%
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	20 Dokumen	100%
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	-	-		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	100%		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	100%
C	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa	70-80	89,01	100%	C	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa	70-80	89,01	100%
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
C.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	C.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	6 Dokumen	100%		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	100%		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	5 Dokumen	100%		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
C.2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	C.2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	100%		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	100%		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	100%
C.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (level)	Level 4 untuk 4 Variabel	-	-	C.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (level)	Level 4 untuk 4 Variabel	-	-
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	225	214	95,10%		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen	150 Dokumen	100%
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50	392	100%		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	250 Dokumen	150 Orang	60%
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	500	500	100%		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	450 Orang	450 Orang	100%

C.4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti dan diterapkan	100%	100%	100%	C.4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti dan diterapkan	100%	100%	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	5 Dokumen	100%		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	5 Dokumen	100%		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

Sumber: LKjIP Sekretariat Daerah Th. 2020 & LKPJ Sekretariat Daerah 2023

Tabel 7 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100%	100,00%
2		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100,00%	100%	100,00%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Batam	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	80,00%	100%	80,00%
4		Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpenuhi Sesuai dengan Ketentuan	100,00%	100%	100,00%
5	Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,03%	100%	85,03%
6	Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100,00%	100%	100,00%
7		Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,27%	100%	95,27%
8		Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,59%	100%	79,59%
9		Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi Sesuai Ketentuan	63,47%	100%	63,47%
10		1. Persentase Jumlah SOP di Lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan 2. Persentase Jumlah PD yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik; 3. Persentase Jumlah PD dengan Nilai IKM Berkategori Baik	94,74%	100%	94,74%

11		Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100,00%	100%	100%
12		Persentase Penyampaian Laporan LPPD dan RLPPD Tepat Waktu	91,04%	100%	91,04%
13		Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	96,34%	100%	96,34%
14		Persentase Produk Hukum yang Telah Diharmonisasi dan disinkronisasikan	100,00%	100%	100,00%
15		1. Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Daerah; 2. Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Kerja Sama Daerah dan Pelaksanaan Program TSP	100,00%	100%	100,00%
16		Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	100,00%	100%	100,00%
17		Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	100,00%	100%	100,00%
18		Tingkat Kematangan UKPBJ (level)	100,00%	100%	100,00%
19		Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti dan diterapkan	100,00%	100%	100,00%

Sumber: RFK Bagian Adpemb Setdako

3.3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 3 Program, 19 kegiatan dan 55 sub kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

Tabel 8 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, Dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100,00%	100%	Sisa Pada Kegiatan Bimbingan Teknis yang dimana target 20 orang dan realisasi 18 orang	
2		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100,00%	100%	Berhasil	
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Batam	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	80,00%	80,00%	Berhasil	
4		Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpenuhi Sesuai dengan Ketentuan	100%	100,00%	100%	Pagu Insentif Masing Masing Pajak Maksimal 5%, Tapi Bagian Perencanaan dan Keuangan hanya 1%, Realisasi hanya 3 Triwulan	
5	Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	85,03%	85,03%	Berhasil	

6	Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100%	100,00%	100,00%	Berhasil	
7		Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	95,27%	95%	Berhasil	
8		Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	79,59%	79,59%	Berhasil	
9		Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi Sesuai Ketentuan	100%	63,47%	63,47%	Berhasil	

10		1. Persentase Jumlah SOP di Lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan 2. Persentase Jumlah PD yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik; 3. Persentase Jumlah PD dengan Nilai IKM Berkategori Baik	100%	94,74%	94,74%	Dengan terbitnya Surat Kemenpanrb No.B/01/RB,06/2023 Hal Penghentian Evaluasi RB Tahun 2023 (Penghentian pengisian PMPRB)	Menindaklan uti surat menpanrb terkait Praktek Baik RB (Nilai RB belum Keluar)
11		Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	100,00%	100%	Berhasil	
12		Persentase Penyampaian Laporan LPPD dan RLPPD Tepat Waktu	100%	91,04%	91,04%	Target 12 Rapat yang terlaksana 6 Rapat	
13		Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	100%	96,34%	96,34%	Berhasil	
14		Persentase Produk Hukum yang Telah Diharmonisasi dan disinkronisasikan	100%	100,00%	100,00%	Berhasil	

15		1. Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Daerah; 2. Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Kerja Sama Daerah dan Pelaksanaan Program TSP	100%	100,00%	100%	Sisa Beasiswa (Pemko Batam membayarkan sesuai jumlah anak yang lulus melalui SNBP dan mahasiswa lanjutan yang aktif)	
16		Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	100%	100,00%	100%	Berhasil	
17		Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	100%	100,00%	100%	Berhasil	
18		Tingkat Kematangan UKPBJ (level)	100%	100,00%	100%	Berhasil	
19		Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti dan diterapkan	100%	100,00%	100%	Berhasil	

Sumber: LKPI Setdako 2023 & RFK

Tabel 9 Tabel Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program Serta Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Indikator %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	4	8
	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indek Kepuasan Layanan Administrasi Umum Sekretariat Daerah;</i>	89,01	100	Menunjang
				<i>Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB</i>	0	0	
		Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Menunjang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	100%	Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	100%	Menunjang
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	Menunjang
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	215 Orang/bulan	100%	Menunjang

			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KEGIATAN DITIADAKAN		
		Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	Menunjang
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	16 Orang	80%	Menunjang
		Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpenuhi Sesuai dengan Ketentuan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terpenuhi Sesuai dengan Ketentuan	100%	100%	Menunjang
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	100%	Menunjang
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	100%	Menunjang
		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Menunjang
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Kantor yang Disediakan	7 Paket	100%	Menunjang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	100%	Menunjang
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	100%	Menunjang
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	100%	Menunjang

				Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100%	100%	Menunjang
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	KEGIATAN DITIADAKAN		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	100%	Menunjang
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	100%	Menunjang
		Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	Menunjang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100%	Menunjang
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100%	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100%	Menunjang
		Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	100%	Menunjang

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	100%	Menunjang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	100%	Menunjang
		Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi Sesuai Ketentuan	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi Sesuai Ketentuan	100%	100%	Menunjang
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	75%	Menunjang
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	87,50%	Menunjang
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Batam	1. Persentase Jumlah SOP di Lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan 2. Persentase Jumlah PD yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik; 3. Persentase Jumlah PD dengan Nilai IKM Berkategori Baik	Penataan Organisasi	1. Persentase Jumlah SOP di Lingkungan Pemkot Batam yang diterapkan 2. Persentase Jumlah PD yang Memiliki PMPRB Berkategori Baik; 3. Persentase Jumlah PD dengan Nilai IKM Berkategori Baik	100%	100%	Menunjang
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	4 Dokumen	100%	Menunjang
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	100%	Menunjang
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	44 Dokumen	100%	Menunjang

			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	1 Dokumen	100%	Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100%	Menunjang
		Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Keprotokolan Pimpinan Daerah yang difasilitasi sesuai ketentuan	100%	100%	Menunjang
			Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	50 Laporan	100%	Menunjang
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 Laporan	100%	Menunjang
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	100%	Menunjang
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada unit-unit pelayanan publik berbasis teknologi informasi		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rekomendasi Kebijakan Layanan Perekonomian;	100%	100%	Menunjang
				Persentase rekomendasi Layanan Kebijakan Administrasi Pembangunan;	100%	100%	Menunjang
		Persentase Penyampaian Laporan LPPD dan RLPPD Tepat Waktu	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Penyampaian Laporan LPPD dan RLPPD Tepat Waktu	100%	100%	Menunjang
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	100%	Menunjang
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	100%	Menunjang
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	100%	Menunjang

		Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Cakupan lembaga keagamaan dan tokoh keagamaan yang diberikan layanan Sesuai Kebutuhan	98,66%	96,16%	Menunjang
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	24 Dokumen	100%	Menunjang
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	250 Dokumen	100%	Menunjang
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	14 Dokumen	100%	Menunjang
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	904 Dokumen	84,64%	Menunjang
		Persentase Produk Hukum yang Telah Diharmonisasi dan disinkronisasikan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang Telah Diharmonisasi dan disinkronisasikan	100%	100%	Menunjang
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Daerah	410 Dokumen	88,10%	Menunjang
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	9 Kasus	100%	Menunjang

			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	757 Dokumen	100%	Menunjang
		1. Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Daerah; 2. Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Kerja Sama Daerah dan Pelaksanaan Program TSP	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1. Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Daerah; 2. Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Kerja Sama Daerah dan Pelaksanaan Program TSP	100%	100%	Menunjang
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	100%	Menunjang
			Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	100%	Menunjang
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	100%	Menunjang
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Jasa</i>	89,01%	100%	Menunjang
				<i>Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti</i>	100%	100%	Menunjang
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	100%	100%	Menunjang
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	100%	Menunjang
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	100%	Menunjang

			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	100%	Menunjang
	Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	100%	100%	Menunjang
			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	100%	Menunjang
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	100%	Menunjang
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	100%	Menunjang
		Tingkat Kematangan UKPBJ (level)	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (level)	-	-	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen	100%	Menunjang
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	150 Orang	100%	Menunjang
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	450 Orang	100%	Menunjang
		Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti dan diterapkan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti dan diterapkan	100%	100%	Menunjang

			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	100%	Menunjang
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	100%	Menunjang
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	100%	Menunjang

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua kegiatan pada tahun 2024 ini memiliki rata-rata tingkat keberhasilan sebesar 98%, meskipun masih juga terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai 100%. Hal ini memberikan keterlibatan pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain ;

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat khususnya bagi pihak internal seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pihak eksternal seperti pihak ke-3.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan serta visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam.
2. Adanya keterlibatan dari daerah lain dan pihak ke-3 melalui kegiatan Kesepakatan Bersama, CSR dan lain lain, untuk mendukung beberapa program/kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kota Batam.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa kegiatan. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya pendukung, baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja. Seperti halnya pada ketersediaan alat elektronik berupa komputer yang mendukung pelaksanaan tugas secara teknis. Kurangnya pengadministrasian kepegawaian, sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2024 akan dilaksanakan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan.

2. Belum Maksimalnya evaluasi setiap bulan maupun triwulan dalam pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil;
3. Capaian hasil (Outcome) pada Sekretariat Daerah Kota Batam umumnya bersifat fisik, sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaiannya kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif bentuk koordinasi dan pembinaan kepada multipihak yang terkait dalam upaya pencapaian target kinerja akan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya.
4. Alokasi sudah di tempatkan sesuai dengan pos-pos masing-masing Sub Kegiatan akan tetapi masih ada anggaran yang ditetapkan belum sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.

3.4. Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Batam terdapat 3 Program 19 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan Berdasarkan APBD-Perubahan tahun 2024 dengan rata-rata pencapaian Program dan Kegiatan sebesar 80,24% dan total persentase mencapai 86,28%, Untuk lebih jelasnya Capaian Anggaran Program dan Kegiatan dijelaskan pada tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	2	3	4	5
	SEKRETARIAT DAERAH	257.819.045.635	229.433.202.565	88,99%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	122.874.226.035	101.120.896.094	82,30%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	196.679.000	183.342.000	93,22%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 94.900.000	Rp. 89.948.000	94,78%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 101.779.000	Rp. 93.394.000	91,76%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.648.780.448	42.326.905.084	96,97%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 43.648.780.448	Rp. 42.326.905.084	96,97%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	227.295.000	166.293.462	73,16%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 227.295.000	Rp. 166.293.462	73,16%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.736.674.500	17.632.325.906	85,03%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 3.562.668.000	Rp. 3.161.792.000	88,75%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 10.427.327.500	Rp. 9.077.921.119	87,06%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 654.450.000	Rp. 465.382.845	71,11%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 6.092.229.000	Rp. 4.927.229.942	80,88%

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	450.852.000	438.200.000,00	97,19%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	0,00	
	Pengadaan Mebel	Rp. 81.750.000	Rp. 78.300.000	95,78%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 369.102.000	Rp. 359.900.000	97,51%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.301.087.600	15.042.441.801	77,94%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 9.076.030.000	Rp. 6.147.408.661	67,73%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 722.200.000	Rp. 497.028.000	68,82%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 9.502.857.600	Rp. 8.398.005.140	88,37%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.714.994.950	17.512.383.991	68,10%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 351.760.000	Rp. 316.296.500	89,92%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 16.719.707.650	Rp. 8.962.113.300	53,60%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 8.643.527.300	Rp. 8.233.974.191	95,26%
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.679.932.737	2.878.683.950	50,68%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 3.894.932.737	Rp. 1.215.389.950	31,20%
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 1.785.000.000	Rp. 1.663.294.000	93,18%
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.802.845.800	3.048.232.600	63,47%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp. 2.701.484.400	Rp. 1.898.148.700	70,26%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp. 2.101.361.400	Rp. 1.150.083.900	54,73%
	Penataan Organisasi	1.649.313.000	1.447.582.300	87,77%
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 296.223.000	Rp. 223.890.440	75,58%
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 415.826.000	Rp. 381.901.000	91,84%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 48.199.000	Rp. 42.774.220	88,75%

	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 773.667.000	Rp. 709.571.520	91,72%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 115.398.000	Rp. 89.445.120	77,51%
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	465.771.000	444.505.000	95,43%
	Fasilitasi Keprotokolan	Rp. 298.275.000	Rp. 282.825.000	94,82%
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp. 166.508.000	Rp. 160.780.000	96,56%
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp. 988.000	Rp. 900.000	91,09%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	133.512.286.400	126.962.717.522	95,09%
	Administrasi Tata Pemerintahan	7.469.942.400	6.523.447.120	87,33%
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp. 1.969.332.000	Rp. 1.382.815.200	70,22%
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 172.968.000	Rp. 135.832.320	78,53%
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 5.327.642.400	Rp. 5.004.799.600	93,94%
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	121.837.663.000	117.376.319.148	96,34%
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp. 81.759.981.000	Rp. 80.947.201.148	99,01%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Rp. 27.010.260.000	Rp. 25.400.000.000	94,04%
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 12.161.208.000	Rp. 10.273.754.000	84,48%
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rp. 906.214.000	Rp. 755.364.000	83,35%
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	715.031.000	601.508.504	84,12%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 9.815.000	Rp. 9.690.000	98,73%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 693.820.000	Rp. 583.476.704	84,10%
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 11.396.000	Rp. 8.341.800	73,20%
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	3.489.650.000	2.461.442.750	70,54%
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp. 3.486.550.000	Rp. 2.458.542.750	70,52%
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Rp. 1.550.000	Rp. 1.450.000	93,55%
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp. 1.550.000	Rp. 1.450.000	93,55%

	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.432.533.200	1.349.588.949	94,21%
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	618.108.000	578.111.100	93,53%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 158.734.000	Rp. 144.558.700	91,07%
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 370.610.000	Rp. 349.638.400	94,34%
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp. 88.764.000	Rp. 83.914.000	94,54%
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	129.341.000	126.550.000	97,84%
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp. 105.650.000	Rp. 104.128.000	98,56%
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp. 12.465.000	Rp. 11.976.000	96,08%
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 11.226.000	Rp. 10.446.000	93,05%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	647.234.200	608.624.449	94,03%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 20.545.000	Rp. 19.721.500	95,99%
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp. 569.008.200	Rp. 545.816.000	95,92%
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 57.681.000	Rp. 43.086.949	74,70%
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	37.850.000	36.303.400	95,91%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp. 13.590.000	Rp. 13.087.400	96,30%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp. 11.825.000	Rp. 11.350.000	95,98%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp. 12.435.000	Rp. 11.866.000	95,42%

Sumber: e-monev Bag. Adpemb Setdako Batam

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari Penjabaran pada bab 3 dapat kita ketahui bahwa Kinerja Sekretariat Daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 88.99% berdasarkan data e-monev bagian Administrasi Pembangunan dapat dikategorikan berdasarkan penilaian SmartID yaitu **“Tinggi”**, hal ini dapat dilihat pada ihtisar pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang memiliki korelasi langsung antara e-monev bagian Administrasi Pembangunan terhadap RPJMD Kota Batam 2021-2026. Sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang telah dipadu-serasikan dengan RPJMD Kota Batam 2021-2026.

4.2. Saran

Dalam rangka perbaikan kinerja OPD ke depan beberapa hal yang dapat menjadi saran, adalah:

1. Hasil pengukuran kinerja yang terdapat dalam Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam yang telah menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dalam perbaikan kinerja Sekretariat Daerah Kota Batam.
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua bidang untuk memperkuat pelaksanaan koordinasi dan sinergi program agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan agar dilakukan secara lebih cermat dan sinergi.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan meningkatkan Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan instansi dan lembaga serta mitra kerja Sekretariat Daerah Kota Batam.
5. Capaian Kinerja tahun 2024 akan menjadi kondisi awal pada Rencana Strategis Sekretariat Kota Batam tahun 2021-2026. Dengan demikian dalam penyusunan

target kinerja dapat disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kota Batam 2021-2026 dengan menselaraskan kondisi internal dan eksternal serta peluang dan tantangan sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2021-2026.

Demikian Laporan Kinerja (LKjIP/LAKIP) tahun 2024 ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, Januari 2025
Sekretaris Daerah Kota Batam



H. JEFRIDIN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19681225 199802 1 006